

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Strategi

Kata Strategi memiliki beberapa macam makna dan arti. Kata strategi berasal dari kata “*strategos*” dalam bahasa Yunani, merupakan gabungan dari kata “*stratos*” yang berarti militer dan “*ag*” yang berarti memimpin.

“Pada mulanya konteks awal strategi dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang sering kali dilakukan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk menaklukkan dan mengalahkan musuh untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Oleh karena itu, istilah strategi sangat lekat dengan dunia militer dan politik” (Nugraha, 2014:2).

Pada awalnya strategi merupakan hal yang lumrah dalam dunia militer menghadapi peperangan untuk mengalahkan musuh. Berbeda dengan organisasi bisnis atau organisasi publik, organisasi pemerintahan tidak memiliki keleluasaan secara tajam untuk membedakan posisi antar pemangku kepentingan (*stake holder*). Hingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun *stake holder* yang memiliki posisi yang dominan dalam organisasi pemerintahan. Karena pada dasarnya organisasi pemerintahan memiliki ketergantungan yang tinggi akan tetapi relatif merata pada hampir semua *stake holder* yang ada.

Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi, strategi menentukan arah langkah suatu

pengembangan organisasi tersebut dalam menentukan strategi yang kompetitif. Adapun strategi dibuat untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat tentunya harus diimplementasikan dalam penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya.

Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen- elemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu, suatu organisasi harus mampu berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan dengan keadaan lingkungan yang ada. Strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi harus mampu berkembang untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada di lingkungannya, di mana strategi harus mampu meresponi organisasi terhadap pilihan kebijakan yang akan diambil. Itu sebabnya suatu strategi mempunyai skema untuk mencapai sasaran apa yang akan dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (Supriatna, 2018:34-35).

Sebagaimana yang dikutip oleh Supriatna dari Marrus, Marrus mendefinisikan bahwa strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang

organisasi, disertai penyusunan upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Maka dari itu, definisi yang disebutkan oleh Marrus dapat dikatakan strategi sebagai cara untuk menentukan sebuah rencana yang dilakukan oleh pemimpin puncak tertinggi. Perancangan strategi tersebut dibuat dengan agar perusahaan atau instansi tersebut dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya. (Marrus, 2002:31)

Strategi yang diutarakan oleh Kaplan dan Norton adalah

“Strategi mendeskripsikan bagaimana perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, pelanggan dan masyarakat. Strategi bukanlah proses manajemen yang berdiri sendiri, ini adalah salah satu langkah dalam sebuah kontinum yang logis yang menggerakkan organisasi dari pernyataan misi tingkat tinggi untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan baris depan dan belakang kantor. Strategi dikembangkan dan berevolusi dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kondisi yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal dan kemampuan internal.

Adapun beberapa indikator strategi menurut Kaplan dan Norton, di antaranya adalah:

1. Strategi menyeimbangkan kekuatan yang bertentangan (*Strength*)
2. Strategi didasarkan pada proposisi nilai pelanggan yang berbeda (*Values*)
3. Nilai diciptakan melalui proses bisnis internal (*Progress*)
4. Strategi terdiri dari tema yang melengkapi secara bersamaan (*Theme*)
5. Keselarasan strategis menentukan nilai aset tak berwujud (*Harmony*) (Kaplan & Norton, 2004:4-32)

Strategi yang diutarakan oleh Kaplan dan Norton di atas, berbicara tentang bagaimana suatu perusahaan membuat added values untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada suatu perusahaan. Karena pada dasarnya strategi tidak dapat berdiri sendiri, strategi dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengarahkan para karyawan untuk dapat

merubah suatu kondisi suatu perusahaan yang sesuai dengan kemampuan di internal perusahaan tersebut.

Menurut Kaplan dan Norton, strategi mendeskripsikan bagaimana perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, pelanggan dan masyarakat. Strategi bukanlah proses manajemen yang berdiri sendiri, ini adalah salah satu langkah dalam sebuah kontinum yang logis yang menggerakkan organisasi dari pernyataan misi tingkat tinggi untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan baris depan dan belakang kantor. Strategi dikembangkan dan berevolusi dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kondisi yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal dan kemampuan internal (Kaplan & Norton, 2004:4-32).

Ada juga Geoff Mulgan yang menyatakan, “Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods”. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicaara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009:19).

Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu: Purposes (Tujuan), Environment (Lingkungan), Direction (Pengarahan), Action

(Tindakan), dan Learning (Pembelajaran). Jika peneliti perhatikan dari kelima komponen yang diutarakan oleh Mulgan, semua komponen tersebut memiliki unsur politik yang kuat, yang tidak lain untuk membuat suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan juga merupakan strategi publik yang jelas berbeda dengan strategi perusahaan. Dari teori dan komponen yang diutarakan oleh Mulgan di atas, Mulgan menilai ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan proses implementasinya, di antaranya adalah power (kekuasaan) dan knowledge (ilmu pengetahuan).

Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk menggunakan teori dan komponen yang diutarakan oleh Geoff Mulgan. di mana dari teori dan kelima komponen di atas, memiliki pendekatan baik secara politik dan pemerintahan dalam merancang strategi dan mengimplementasikan strategi yang dibuat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, peneliti memiliki beberapa sub indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, sebagaimana yang peneliti ungkapkan di bawah ini:

1. *Purposes* (Tujuan), peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh konsep masyarakat Jepang tentang tujuan (*purposes*) itu sendiri, yang dinamakan Ikigai, yang merupakan konsep masyarakat Jepang yang berarti sebuah alasan untuk tujuan. Di mana indikator dari Ikigai adalah, *mission* (misi) dan *passion/vocation* (bakat/kemampuan). Dari

indikator konsep masyarakat Jepang tentang tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut

2. *Environment* (Lingkungan) peneliti mengambil teori yang dikeluarkan oleh *United States Environmental Protection Agency*, 2011. Yang menyatakan bahwa indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari *changes in ambient conditions* (perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar), dan *change of human health* (perubahan pada kesehatan manusia).

3. *Direction* (Pengarahan) peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh George R. Terry (1986), yang merupakan

“Usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.”

Pada bagian ini terdapat empat indikator pengarahan atau *directions*, di antaranya adalah, koordinasi (*coordination*), motivasi (*motivation*), komunikasi (*communication*), dan perintah (*command*). Pada *directions* atau pengarahan dapat kita ketahui ada empat indikator yang dapat menjadi acuan dari sebuah pengarahan.

4. *Action* (Tindakan), pada bagian ini terdapat tiga indikator, di antaranya adalah: *external situation* (situasi eksternal), *device* (perangkat yang digunakan), dan *decission making* (pengambilan

keputusan). Ketiga hal ini sangat berkaitan erat saat akan melakukan sebuah tindakan.

5. *Learning* (Pembelajaran), pada bagian ini terdapat dua indikator penting, di antaranya adalah: *comparation method* (metode perbandingan), dan *identification* (identifikasi).

Menurut pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa strategi merupakan rencana yang disusun oleh manajemen puncak (Top Management) untuk mencapai tujuan yang diinginkan, rencana ini bisa meliputi tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk mempertahankan dan menguatkan eksistensi organisasi dan mampu memenangkan persaingan di luar, namun yang terpenting bagi perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif untuk meningkatkan daya saing. Cara berpikir strategis ini tentunya sangat penting bagi sebuah organisasi, karena strategi merupakan langkah awal untuk memahami dan mengimplementasikan strategi tersebut.

2.1.1.1 Tipe-Tipe Strategi

Menurut Rangkuti, pada prinsipnya strategi dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu :

1. Strategi Manajemen
Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi pembengangan produk, strategi penerapan harga, startegi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan sebagainya.

2. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.

3. Strategi Bisnis

Strategi Bisnis ini sering juga di sebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi fungsi kegiatann manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, startegi distribusi, strategi organisasi, dan strategi strategi yang berhubungan dengan keuangan

(Scott, 2013:21-22).

Sebagaimana yang Rangkuti kutip dari Scott menyatakan bahwa strategi terbagi menjadi tiga klasifikasi di antaranya, strategi manajemen, strategi investasi, strategi bisnis. Dari klasifikasi yang dibuat oleh Rangkuti yang kemudian dikutip oleh Scott strategi tersebut adalah strategi yang digunakan dalam dunia bisnis pada sebuah perusahaan.

2.1.1.2 Pengelompokan Strategi

Menurut Scott yang dikutip dari Hunger dan Wheelen, apabila strategi yang dibuat oleh organisasi atau instansi fungsional, maka terdapat beberapa strategi yang lebih mengarah kepada rumusan operasional yang harus dilakukan oleh tim dalam suatu perusahaan.

Ada beberapa jenis strategi fungsional, yaitu:

1. Strategi Produksi: strategi yang berkaitan dengan cara memproduksi suatu barang atau jasa dalam sebuah perusahaan, menempatkan hasil produksi itu ke dalam kriteria produk unggulan, produk kompetitif, produk baru, sesuai dengan kompetensi produk yang dimiliki

2. Strategi Pemasaran dan promosi: strategi pemasaran digunakan untuk menentukan pasar mana yang akan dibidik, kondisi pasar seperti apa yang diinginkan, dan lain sebagainya. Sedangkan strategi promosi adalah strategi untuk menentukan cara peluncuran produk, promosi yang akan dilakukan, dan juga media promosi yang akan dipakai.
3. Strategi Keuangan: Strategi yang berkaitan dengan pendanaan atau modal yang dipakai dalam proses produksi, pemasaran, promosi, dan kegiatan fungsional lainnya. Strategi keuangan ini menentukan dari mana sumber tersebut didapatkan dan juga cara pendistribusiannya ke pos-pos yang bersangkutan.
4. Strategi SDM (Sumber Daya Manusia): strategi yang menyangkut orang-orang yang melakukan seluruh proses fungsional, mulai dari produksi, pemasaran, promosi, dan hal lain yang menggerakkan perusahaan tersebut
5. Strategi fungsional lain : hal ini berkaitan dengan pihak-pihak di luar perusahaan, seperti supplier, konsultan, agen, dan lain-lain
(Scott, 2013:25-26)

Dari pengelompokan strategi yang diungkapkan oleh Afriyanti yang dikutip oleh Scott, strategi sendiri dibagi dalam lima kelompok untuk dapat memudahkan strategi apa yang akan dipakai oleh perusahaan atau organisasi agar tepat sasaran untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut.

2.1.1.3 Tahapan Penyusunan Strategi

Tahapan penyusunan strategi pada organisasi pemerintahan terdapat dua macam/model pendekatan, yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*). Untuk model *top down approach*, proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan lebih diprioritaskan pada pendapat-

pendapat level atas yang kemudian diturunkan pada tingkat selanjutnya. Sebaliknya, untuk *model bottom up approach*, level bawah dan menengah menjadi titik awal dari proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan. Adapun beberapa langkah untuk menyusun strategi, adalah:

1. Identifikasi Masalah
Sebagai tahap awal untuk menyusun strategi dengan berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Proses identifikasi masalah tersebut dapat dilakukan menggunakan metode *brainstroming* atau *polling* pendapat sebagai upaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada.
2. Pengelompokan Masalah
Dari tahapan identifikasi masalah di atas akan muncul masalah baru yang beraneka ragam. Maka dari itu untuk mempermudah cara pemecahannya, perlu dilakukannya pengelompokan/pengklasifikasian masalah yang sesuai dengan sifat atau karakter tujuan pengelompokan masalah tersebut.
3. Proses Abraksi
Setelah kelompok masalah terbentuk, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah-masalah krusial dari tiap kelompok. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis terhadap masalah tersebut guna mencari faktor penyebab timbulnya masalah. Tahap ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena faktor-faktor ini akan disusun bersamaan dengan metode pemecahan masalahnya.
4. Penentuan Cara Pemecahan Masalah
Setelah tahap abstraksi selesai dilakukan, hal berikutnya yang dilakukan adalah menyelesaikan/memecahkan masalah yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Metode atau cara penyelesaian masalah ini harus konkret dan spesifik.
5. Perencanaan Untuk Implementasi
Tahapan untuk Penyusunan strategi di atas merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Namun hal terpenting dari semua penyusunan tersebut adalah mengimplementasikan seluruh penyusunan strategi yang sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Nugraha, 2014:21)

Nugraha menyatakan bahwa untuk menyusun suatu strategi diperlukan setidaknya lima tahapan yang harus dilakukan, yaitu identifikasi masalah,

pengelompokan masalah, proses abstraksi, penentuan cara pemecahan masalah, dan perencanaan untuk implementasi.

2.1.1.4 Faktor-Faktor Penentu Pemilihan Strategi

Ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui variabel atau faktor apa saja yang berpengaruh pada penentuan dalam pemilihan strategi yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada variabel eksternal dan internal yang mempengaruhi pola penentuan strategi, yaitu: keterbatasan sumber daya dan keuangan, prioritas pemangku kepentingan (stake holder), agenda politik, tingkat dukungan publik, ketersediaan anggaran pemerintah, Perimbangan kekuatan konstituen, dan Mandat hukum.

Sementara itu, terdapat juga variabel internal yang memiliki pengaruh pada pemilihan strategi, yaitu: Kepemimpinan organisasi, Kapasitas organisasi, Konsensus internal akan kebijakan yang dipilih, Diskresi oleh pengendali politik, Alternatif ketersediaan sumber dana, Tipe kebijakan, dan Perubahan teknologi pada pemberian pelayanan.

2.1.1.5 Penerapan Strategi

Menurut David, penerapan strategi merupakan tahap aksi dari manajemen strategis. Menerapkan strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Sering kali dianggap sebagai tahap yang paling sulit dalam manajemen strategis. Penerapan strategi membutuhkan disiplin,

komitmen, dan pengorbanan personal. Penerapan strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni daripada pengetahuan. Strategi yang telah dirumuskan, namun tidak diterapkan berarti strategi tersebut tidak ada gunanya. Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. penerapan strategi mencakup: pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

Dari pandangan David, penerapan strategi harus dilakukan untuk dapat menetapkan tujuan tahunan dan kebijakan-kebijakan perusahaan atau organisasi, sehingga perusahaan atau organisasi tersebut terarah dan dapat menjalankan perusahaan atau organisasi tersebut dengan baik (David, 2011:7).

2.1.1.6 Penilaian Strategi

Menurut David, Penilaian strategi merupakan tahap terakhir dalam manajemen strategis. Manajer harus tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi tersebut. Semua strategi terbuka

untuk dimodifikasi di masa yang akan datang karena berbagai faktor eksternal dan internal akan terus-menerus berubah. Penilaian strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak selalu berhasil nanti.

Ada tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar yaitu: peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif. Penilaian suatu strategi dianggap penting oleh David, pada dasarnya dibuat agar dapat diketahui strategi mana yang tidak berjalan maksimal dan mana strategi yang bahkan tidak berjalan sama sekali, yang kemudian dapat dirubah dengan mengikuti perkembangan yang terus menerus mengalami perubahan (David, 2011:7).

2.1.2 Pemerintahan Daerah

Dalam mengoptimalkan fungsinya, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan di daerahnya. Maka dari itu kewenangan tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah berasal dari *local government* yang dijelaskan Hoessen sebagaimana dikutip oleh Nurcholis, bahwa "*local government* dapat mengandung tiga arti, pertama, berarti pemerintahan lokal, kedua, berarti pemeritah lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, dan ketiga, berarti daerah otomom." (Nurcholis, 2007:24)

Pendapat Hossein tersebut yang pertama apabila ditelusuri menunjuk pada lembaga/organisasinya. Maksudnya yaitu *local government* organ/badan/organisasi di tingkat daerah atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemerintah di daerah. *local government* dalam pengertian yang ketiga adalah daerah otonom artinya *local government* memiliki otonomi arti *self government* yaitu memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengutip dalam bukunya Nurcholis *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* menjelaskan Pemerintahan Daerah otonom adalah Pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang perundangan dan tetap mengakui supermasi kedaulatan nasional.” (Nurrcholis, 2007: 26).

Dari beberapa penjelasan yang telah di paparkan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh badan atau lembaga daerah/lokal di daerah dengan tetap terfokus dan bertanggung jawab kepada pemerintahan nasional tanpa adanya kontrol yang berlebihan dari kekuasaan yang tinggi terhadap keputusan yang diambil bertujuan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri.

Tugas dan fungsi pemerintahan yang dijelaskan tentu dapat menggambarkan kualitas dari pemerintah itu sendiri, jika pemerintah

dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka dengan sendirinya pemerintah tersebut akan berjalan dengan baik dan dapat menciptakan kemakmuran.

Fungsi pemerintah menurut pendapat Ryas Rasyid yang mana fungsi tersebut itu terbagi atas tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Dipandang dari kacamata etika, keberhasilan seseorang di dalam memimpin pemerintahan harus diukur dari kemampuannya mengemban tiga fungsi yang hakiki. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid, 1997:48)

Salah satu fungsi pemerintah ialah melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan pelanggan, tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara ekstrak ukuran kepuasannya, sangat sensitif dan sukar diprediksi kedepannya, serta sangat tergantung pada nilai yang dianggap pantas oleh pelanggan terhadap apa yang diterima dan dibayarnya. Pelayanan disini berarti memberikan pelayanan kepada masyarakat atau disebut dengan pelayanan publik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak

sipil setiap warga negara atas barang dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Fungsi Pemberdayaan Menurut Ryas Rasyid, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat (1997:48). Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintahan daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaans sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan, pusat dan daerah diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengajak, membina masyarakat agar menjadi lebih memahami maksud dari apa yang disampaikan oleh pemerintah agar masyarakat menjadi

lebih mandiri dan kelak bisa berdiri sendiri demi kesejahteraan masyarakat

Fungsi Pembangunan Menurut Ryas Rasyid tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid, 1997:48).

Proses pembangunan yang terjadi bukanlah yang sifatnya alami, melainkan suatu yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan Menurut Mardikanto dan Soebianto, bahwa Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerut oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.” (Mardikanto dan Soebianto, 2017:6)

Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi di atas, dilihat bahwa pemerintah memiliki fungsi untuk menjalankan kewajibannya dalam memenuhi masyarakat mengenai tingkah laku ideal pemerintah yang

dilakukan dalam kedudukan atau status yang ia miliki. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan peran pemerintah untuk memenuhi harapan-harapan dari masyarakat.

2.1.3 Pengertian Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 1 butir (1), menyatakan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic faktor*). (Mulyanto, 2007:1)

Lingkungan hidup mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya. (Husein, 1995:6).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan semua sumber daya, termasuk makhluk hidup, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis

untuk kelangsungan hidupnya. Faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak dari manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 1 butir (2) menyatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, dan penegakan hukum.

Lilin Budiati (2012:25) dalam bukunya *Good Governance* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang telah menuntut dikembangkan berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya.

Kendala-kendala yang sering terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA);
- c. Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup;
- e. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat sebagai upaya sistematis dan

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan keberadaan Undang-Undang tersebut, maka dapat digunakan untuk mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan.

Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.

Berdasarkan aturan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup harus didasarkan pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan yang jelas, serta harus adanya konsep pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga menjelaskan dengan tentang pencemaran, kerusakan, dan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik ,kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketiga hal tersebut diatas menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan tersebut berakibat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan dapat pula karena faktor alami. Dampak dari perubahannya belum tentu sama, namun akhirnya manusia juga yang mesti memikul serta, mengawasinya.

2.1.4 Sampah

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006:12)

Menurut Manik dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, sampah didefinisikan sebagai “suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan manusia. Dengan demikian sampah bersalah dari kegiatan industri, pertanian, peternakan dan kegiatan manusia lainnya.” (Manik, 2003: 67).

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang sudah tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dengan kata lain pada dasarnya sampah merupakan suatu bahan dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang terbuang atau dibuang yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang maupun membersihkannya memerlukan biaya yang relatif besar.

Dari beberapa penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sampah merupakan limbah suatu benda atau bahan bersifat padat, terdiri atas/atau bahan organik maupun anorganik yang dianggap sudah tidak memiliki manfaat lagi, adanya kaitannya dengan kegiatan manusia

yang tidak terpakai, segala sesuatu yang sudah tidak diinginkan oleh masyarakat serta tidak disenangi dan dibuang termasuk dalam kategori sampah.

Jenis-Jenis Sampah

Menurut *The American Public Works Association* (APWA) mengklasifikasikan jenis – jenis sampah berdasarkan asal, karakter, dan bahan aslinya sebagai berikut:

1. *Garbage*, didefinisikan sebagai sampah yang dihasilkan dari proses penyiapan, pengelolaan dan penyediaan makanan dan dapat dihasilkan dari rumah tangga, institusi dan badan – badan komersial seperti hotel, toko, restoran, dan pasar
2. *Rubbish*, merupakan barang – barang seperti kertas, kardus, karton, kotak kayu, plastik, kain – kain sisa, pakaian, seprei, selimut, kulit, karet, rumput, daun, dan sisa – sisa kebun. *Non-combustible rubbish* termasuk kaleng, kertas timah (*foils*), tanah/lumpur, batu, bata, keramik, botol kaca, tembikar, dan sampah mineral lainnya.

Pengertian istilah “domestik” sendiri menurut KBBI adalah hal yang bersifat rumah tangga. Sehingga sampah domestik yaitu segala sesuatu yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan sudah tidak diinginkan oleh masyarakat serta tidak disenangi dan dibuang termasuk dalam kategori sampah.

Sampah domestik merupakan sampah daerah permukiman yang berupa sampah-sampah hasil kegiatan rumah tangga seperti sampah dapur, kertas, tekstil, kulit, logam, kaca, kayu dan sebagainya. (Rahmadhani, 2014:43)

Sampah domestik ini juga membahayakan lingkungan seperti yang selanjutnya dijelaskan oleh Rahmadhani sebagai berikut Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3). Bila hal ini terjadi maka akan diperlukan waktu yang sangat lama sampai sampah terdegradasi atau larut dari lokasi tersebut. Selama waktu itu lahan setempat berpotensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.” (Rahmadhani, 2014:43)

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dilihat dari dampaknya terhadap lahan yang cukup berbahaya, sampah domestik perlu ditangani dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pengaruh buruk pula terhadap manusia dan lingkungannya.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Alfiandra menggambarkan secara sederhana tahapan – tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode tertentu.
- b. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA)
- c. Pembuangan akhir, tempat sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. (Alfiandra, 2009)

Pengelolaan sampah domestik dikategorikan menjadi 4 jenis berdasarkan permasalahan yang penyebabnya, hal ini dijelaskan oleh Kwailane, Gwebu, dan Hambira sebagai berikut *Domestic waste management has been characterized by the following problems insufficient resources channeled into the services, inadequate legislative provision, low environmental education, and lack of training programs to produce the required technical staff. This has resulted in waste finding its way into ungazetted areas such as streams, highways, pathways, fields, and public spaces.*” (Kwailane, Gwebu, dan Hambira, 2016)

Keempat kategori permasalahan yang dihadapi oleh pengelolaan sampah domestik inilah yang menyebabkan sampah tersebar dimana-mana termasuk di lapangan, aliran pengairan, dan ruang publik.

Menurut Manik dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, “Pengelolaan sampah adalah pengumpulan sampah

yang terkoordinir yang dibedakan atas jenisnya masing-masing yang selanjutnya diberi tindakan baik pembakaran, penumpukan, pembunuhan berlapis, dan pengomposan.” (Manik, 2003: 68-69).

Selanjutnya Manik mebagi jenis pemerosesan sampah sebagai berikut:

1. Pembakaran (*Incumention*)
Pengelolaan sampah dengan sistem pembakaran adalah pembuangan sampah di TPA kemudian di bakar. Pembakaran sampah tidak dilakukan ditempat terbuka, tetapi di tempat tertutup dengan mesin dan peralatan yang khusus dirancang untuk pembakaran sampah. Sistem ini memang lebih praktis, tetapi memerlukan biaya besar untuk pembangunan, oprasional dan pemeliharaan mesin dan peralatan lain.
2. Penumpukan (*dumping*)
Sistem dumping adalah pembuangan sampah dengan penumpukan diatas tanah terbuka. Dengan cara ini, TPA memerlukan tanah yang luas dan sampah ditumpuk begitusaja, tanpa adanya perlakuan. Sistem dumping memang dapat menekan biaya, tetapi sudah jarang dilakukan karena masyarakat disekitar TPA terganggu oleh bau sampah tersebut.
3. Penimbunan berlapis (*sanitary landfiil*)
Pengelolaan sampah dengan cara ini adalah pembuangan sampah di TPA yang diikuti dengan penimbunan sampah dengan tanah. Sampah ditumbunan dengan cara berlapis sehingga tidak ada sampah yang tanpak dipermukaan tanah.
4. Pengomposan (*Composting*)
Pengelolaan sampah dengan cara pengomposan merupakan pemanfaatan sampah organic menjadi bahan kompos. Untuk tujuan pengomposan, sampah harus dipilah-pilah sehingga sampah organik dan anorganik terpisah. Masing-masing sampah anorganik seperti kaca, botol plastik dijual kepedagang pengepul, dan selanjutnya di daur ulang. Pengomposan merupakan bagian dari pengelolaan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R). (Manik, 2009: 67-71)

Dari beberapa penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap dengan berbagai indikator yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah

sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain, mengurangi volume sampah atau memusnahkan sampah yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Tindakan tersebut dapat berupa pembakaran, penimbunan dan pendaurulangan sampah.

Dengan kata lain pengelolaan sampah ini merupakan kegiatan yang ditujukan sebagai upaya agar keberadaan sampah tidak berbahaya bagi lingkungan. Program pengelolaan sampah ini juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan sehingga lingkungan masih terjaga dan keadaan lingkungan tidak menimbulkan dampak buruk bagi daerah sekitarnya.

2.1.5 Pengelolaan 3R

Menurut Kastaman dan Kramadibrata, dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu*, konsep *Reduce, Reuse, Recycle* atau 3R adalah sebagai berikut Konsep *reduce, reuse* dan *recycle* (3R) merupakan pedoman sederhana untuk membantu masyarakat dalam meminimumkan sampah baik ditempat kerja, sekolah, maupun dirumha. Pada dasarnya, orientasi penerapan konsep 3R ini lebih ditekankan pada sampah anorganik. Sedangkan untuk penanganan sampah organik telah lebih dulubanyak dikembangkan orang dalam bentuk kompos dari sampah organik. Dalam meminimumkan sampah tersebut, yang harus menjadi fokus utama adalah mengurangi (*reduce*) penggunaan bahan yang menimbulkan sampah anorganis, kemudian

memakai ulang (*reuse*), dan terakhir adalah mendaur ulang (*recycle*), termasuk juga didalamnya proses pengelolaan sampah organik (*compos*).”

(Kastaman dan Kramadibrata, 2007: 81)

Selanjutnya Kastaman dan Kramadibrata menutarakan penjelasan dari konsep *reduce, reuse, recycle* atau 3R secara terperinci, sebagai berikut:

1. *Reduce*, yaitu mengurangi bahan timbulan sampah yang dapat beraarti membiasakan hidup dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan cermat sehingga sampah yang dihasilkan ditekan seminimal mungkin. Hal tersebut berupa:
 - a. Berbelanja dengan betul-betul mencari produk yang memiliki kemasan sedikit mungkin
 - b. Membuat produk dirumah, dan tidak membeli makanan siap saji
 - c. Mengupayakan untuk membuat dari pada membeli sesuatu yang semsetinya dapat dibuat sendiri.
 - d. Menanam sendiri sayuran atau buah-buahan
 - e. Lebih baik merawat dari pada memperbaiki pakaian, mainan, perkakas dan peralatan rumah tangga dari pada harus menggantinya dengan yang baru.
 - f. Menjaga agar setiap barang yang dimiliki berumur panjang.
2. *Reuse*, memakai kembali mengandung arti memakai item yang sama lebih dari sekali, lebih baik digunakan beberapa kali dari pada harus membuang setelah sekali pakai. Konsep memakai kembali ini dapat menghemat energi dan sumber daya yang boleh jadi digunakan untuk membuat produk baru.
3. *Recycle*, mendaur ulang dapat berarti mengembalikan sampah ke pabrik sehingga dapat digunakan kembali sebagai bahan baku untuk membuat produk yang sama atau yang lainnya, sebagai contoh gunakan kaleng aluminium untuk kemasan minuman ringan yang dapat didaur ulang untuk produk yang sama atau untuk digunakan sebagai komponen kendaraan bermotor. Daur ulang hemat energy, tempat, dan biaya penggunaan bahan tersebut untuk dibuat menjadi produk baru. (Kastaman dan Kramadibrata, 2007: 82-85).

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola 3R merupakan pedoman sederhana dan cara pengelolaan sampah yang ideal dan wajib diterapkan dalam pengelolaan sampah yang tujuannya

untuk mengurangi sampah dari lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar.

2.1.6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Paradigma TPA yang dulu merupakan tempat pembuangan akhir sampah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 (2008:3) menjadi tempat pemrosesan akhir sampah didefinisikan sebagai pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dijelaskan mengenai lokasi TPA. Adapun lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, paling sedikit memenuhi syarat, yaitu: (1) Geologi, yang dimaksud dengan kondisi geologi adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung, (2) Hidrogeologi, yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain

kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 meter di hilir aliran, (3) Kemiringan zona, yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20%, (4)

Jarak dari permukiman, yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 kilometer dengan mempertimbangkan pencemaran leachate, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial, (5) Tidak berada di kawasan lindung atau cagar alam, (6) Bukan daerah banjir periode ulang 25 tahun.

Pengolahan sampah dengan metode pembuangan akhir dilakukan dengan teknik penimbunan sampah. Tujuan utama penimbunan akhir adalah menyimpan sampah padat, dengan cara-cara yang tepat dan menjamin keamanan lingkungan. Menstabilkan sampah (mengkonversi menjadi tanah), dan merubahnya ke dalam siklus metabolisme alam.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam Pengelolaan sampah diperlukan adanya kerja sama antar pihak baik pemerintah dengan masyarakat .ada berbagai macam masalah yang mungkin belum dapat diselesaikan oleh pemerintah terkait seperti masih adanya kurang komunikasi antar bagian yang dimana pengelolaan Sampah itu belum berjalan seperti seharusnya masyarakat hanya tau membuang sampah saja tanpa tau bahwa dengan sampah bisa menghasilkan uang serta bisa mengurangi produksi sampah yang dihasilkan , meskipun upaya tersebut sudah dilakukan harus adanya dukungan dari masyarakatnya agar bisa mengelola sampah rumah tangganya sehingga mempermudah petugas dilapangan untuk mengelola, Maka dari itu permasalahan seperti ini di diperlukan kerja sama

semua elemen dalam suatu instansi pemerintah harus cepat terselasaikan agar dalam hal pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan jelas.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti pengelolaan sampah dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam sarana dan prasarana Maka diperlukan kerja sama semua pihak untuk mengelola sampah ini dengan baik sehingga lahan yang baru nanti bisa dipakai dan dipergunakan sebaik mungkin. Peneliti menggunakan teori dan komponen yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan untuk meneliti strategi apa yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi *overload* di antaranya adalah:

Tujuan (*Purposes*),Lingkungan (*Environments*),Pengarahan (*Directions*), Tindakan (*Actions*), dan Pembelajaran (*Learnings*).

Agar suatu strategi dapat dibuat dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah, strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan memerlukan Kekuasaan (*Power*) dan Ilmu Pengetahuan (*Knowledge*) untuk menunjang semua komponen yang diutarakan oleh Mulgan. Hal tersebut peneliti jabarkan sebagai berikut:

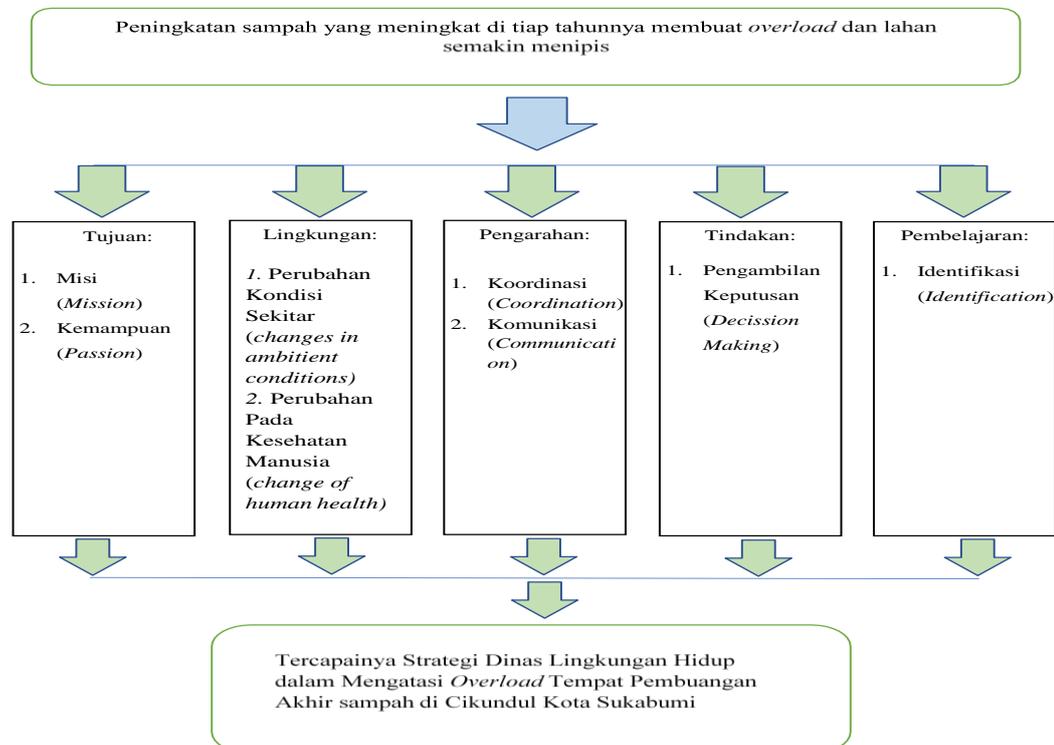
- a. Tujuan (*purposes*), adalah upaya untuk mencapai hal yang menjadi sasaran yang akan dijangkau oleh Dinas Lingkungan Hidup. Di mana pada tujuan ini juga meliputi misi, yang berupa arah yang diinginkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memaksimalkan kemampuan yang ada guna melakukan pengelolaan sampah dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang.
- b. Lingkungan (*environments*) Lingkungan juga meliputi aspek perubahan pada kondisi sekitar, lingkungan yang juga turut mempengaruhi strategi yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi *Overload*

juga dalam hal perubahan pada kesehatan manusia.

- c. Pengarahan (*directions*), adalah petunjuk atau instruksi atau arahan yang diberikan oleh pemberi arahan (dalam hal ini adalah pimpinan) yang meliputi koordinasi, komunikasi, untuk melakukan suatu perintah resmi yang berasal dari pimpinan, guna Mengatasi *Overload* di Tempat Pembuangan Akhir Cikundul Kota Sukabumi.
- d. Tindakan (*actions*), adalah upaya yang dilakukan guna mendapatkan hal-hal yang menjadi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi atau perangkat pemerintahan di mana pada tindakan meliputi situasi di eksternal, dan didukung dengan bagian-bagian yang ada dan dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga nantinya dapat diambil suatu keputusan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi *Overload* di Tempat Pembuangan Akhir Cikundul Kota Sukabumi.
- e. Pembelajaran (*Learnings*), adalah proses yang dilakukan oleh organisasi atau perangkat pemerintahan untuk menentukan strategi maupun merumuskan kebijakan yang di mana di dalamnya meliputi identifikasi. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup dapat mengatasi *Overload* di Tempat Pembuangan Akhir Cikundul Kota Sukabumi.

Maka dapat disimpulkan melalui model kerangka pemikiran di bawah ini yang penjelasannya sudah dipaparkan di atas seperti adanya aspek tujuan, lingkungan, pengarahannya, tindakan, dan pembelajaran.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



(Sumber: Peneliti, 2022)

2.3 Proposisi

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran peneliti diatas, maka proposisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi *Overload* di Tempat Pembuangan Akhir di Cikundul Kota Sukabumi ditentukan oleh indikator Tujuan, Lingkungan, Pengarahan, Tindakan, dan Pembelajaran